

## **The Role of the Nahdlatul Ulama Organization in Empowering Women in 1989-1997**

Nazidatul Khoiro<sup>1</sup>, Nurul Umamah<sup>2</sup>, Marjono<sup>3</sup>, Sumardi<sup>4</sup>, Riza Afita Surya<sup>5</sup>

Pendidikan Sejarah Universitas Jember

E-mail: [Nazida211@gmail.com](mailto:Nazida211@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Nahdlatul Ulama' is the largest socio-religious organization in Indonesian, has many contributions in various fields, one of which is the empowerment of women. This research examines the policies and efforts of NU in women's empowerment in 1989-1997. This research uses historical research methods. The policy that has been made by NU in empowering women is that women must have good quality knowledge and skills, then women must conform to the nature of Islamic women, women receive the same education as men and finally the policy of women has the right to health and freedom in politics. This policy is implemented by NU through efforts, namely discussion forums, skills training, construction of education and health facilities, holding seminars, and finally gender training. This lasted from 1989 to 1997. This research is expected to motivate all groups, both women and men, to participate in implementing the role played by the NU organization in empowering women, so that there are no violations of women's human rights or discrimination of women.

**Key Word: Role, Nahdlatul Ulama', Empowerment Women**

## PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama' yang biasa disingkat NU, merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar dengan pengikut mencapai 88,7% dari 269 juta jiwa penduduk Indonesia (BPS, 2019). Warga NU menjadi mayoritas di daerah-daerah sampai pelosok Indonesia, dikarenakan NU dalam pengkaderan anggotanya dengan menanamkan Ahlussunnah wal Jamaah dan berpegang teguh pada landasan Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas, sehingga tidak terjerumus kefahaman radikal, hal tersebut menjadikan NU memiliki banyak pengikut (Haidar A, 2011:2). NU memiliki anggota yang banyak sehingga sangat rentan terjadinya perpecahan, maka dari itu NU menghimbau pada semua anggotanya untuk tetap berpegang pada prinsip dan landasan organisasi sehingga nilai moderasi dan toleransi sesama umat dapat terjaga.

Nahdlatul Ulama' (NU) memiliki kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara Indonesia diberbagai bidang, seperti bidang kesehatan, ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, politik dan keagamaan (Munfaridah, 2017:27). Aktivasnya meliputi pendirian madrasah, pendirian rumah sakit, dan pendirian koperasi. Guna mendukung kegiatan tersebut NU mendirikan lembaga-lembaga yang bergerak pada bidang tertentu diantaranya LP Ma'arif NU pada bidang pendidikan, LKNU pada bidang kesehatan, LPNU pada bidang ekonomi. Selain itu, NU mengadakan pelatihan-pelatihan kader dan anggotanya, seperti pelatihan memberantas buta huruf dan kesehatan reproduksi bagi perempuan (Parawansa, 2015:28). Kontribusi tersebut membuat NU diperhitungkan banyak pihak sebagai organisasi yang memiliki peran dalam memajukan bangsa dan negara.

Muslimat dan Fatayat NU merupakan badan otonom di bawah naungan organisasi NU, yang bertujuan menjadi wadah bagi perempuan untuk berproses menjadi lebih baik. Muslimat NU diresmikan pada Kongres NU ke 19 tahun 1952 di Palembang, sedangkan Fatayat NU didirikan tahun 1950, kedua banom tersebut bergerak dalam pemberdayaan perempuan (Ismiati, 2017:9). Pada awal pembentukan Muslimat dan Fatayat NU belum mendapat respond yang cukup signifikan dari organisai induk (NU), baru pada Muktamar ke 28 tahun 1989 di Yogyakarta NU membahas dan mengeluarkan kebijakan untuk para perempuan

sesuai dengan landasan dan prinsip organisasi NU (Ma'mur 2015:12). Dengan demikian, pemberdayaan perempuan yang lebih terorganisir oleh NU dimulai pada tahun 1989, mengikuti kebijakan negara Indonesia yang sesuai dengan asas organisasi NU yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Tokoh-tokoh perempuan NU banyak memiliki kiprah di ranah publik, diantaranya adalah Khofifah Indar Parawansa sebagai ketua PP Muslimat tahun 1999-2021 menjadi Menteri Pemberdayaan perempuan pada masa pemerintahan Gus Dur dan menjadi menteri sosial pada masa pemerintahan Jokowi-JK, kemudian Ermalena yang mempunyai kiprah di lembaga kesehatan dan ekonomi (Roviana, 2014: 404-405). Selain 2 tokoh tersebut masih banyak lagi yang memiliki kiprah di ranah publik, mereka menunjukkan bahwa para perempuan dapat menjadi seorang aktivis, dokter, guru, wartawan, wanita pembisnis dan politikus pada masa sekarang (Zayd, 2003:227). Hal tersebut tak lepas dari organisasi yang menaungi mereka (NU), kesempatan dan pengetahuan yang di berikan oleh organisasi membuat para perempuan memiliki kualitas yang baik dan berhasil menunjukkan di ranah publik.

Maksud Judul “Peranan Organisasi NU dalam Pemberdayaan Perempuan pada Tahun 1989-1997” adalah tindakan organisasi NU dalam membuat keputusan tentang kebijakan dan pelaksanaannya untuk memberdayakan perempuan pada aspek perlindungan sosial, pendidikan dan pemenuhan hak-hak perempuan pada tahun 1989-1997. Penelitian ini merupakan perkembangan baru dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena hampir sebagian besar penelitian sebelumnya membahas tentang perempuan yang melakukan pemberdayaan, belum ada yang membahas secara khusus tentang organisasi NU itu sendiri dalam pemberdayaan perempuan.

Penyusunan tulisan ini merupakan penelitian sejarah nasional, karena ruang lingkup spasial penelitian ini mencakup skala nasional yaitu NKRI. Dengan ruang lingkup temporalnya dimulai tahun 1989 sampai 1997, fokus materi yang akan dibahas adalah kebijakan organisasi NU dalam pemberdayaan perempuan, kemudian usaha-usaha NU dalam pemberdayaan perempuan, dan terakhir adalah hasil dari usaha-usaha yang dilakukan organisasi NU. Berdasarkan latar belakang

dan ruang lingkup permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: (1) Bagaimana kebijakan Nahdlatul Ulama' dalam pemberdayaan perempuan tahun 1989-1997?, dan (2) Bagaimana usaha yang dilakukan organisasi NU dalam pemberdayaan perempuan tahun 1989-1997?. Pada penelitian ini akan terjadi proses berpikir, dalam melakukan suatu perbuatan pasti terdapat dasarnya dan akan ada hasil yang diperoleh setelah melakukan tindakan tersebut. Karna itulah penting mengetahui dasar, dan tindakan yang dilakukan sehingga dapat diketahui hasil dari peranan yang dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, Interpretasi dan Historiografi (Kuntowijoyo, 2013: 69-80). Langkah awal peneliti menentukan topik yaitu peranan NU terhadap perempuan tahun 1989-1997. kemudian langkah kedua pengumpulan sumber (Heuristik), peneliti melakukan penelusuran sumber dengan mendatangi perpustakaan dan museum NU, peneliti menemukan sumber primer yaitu hasil-hasil Mukatamar NU, AD/ART NU, hasil Munas dan Konbes NU yang telah dipublikasikan oleh PBNU ataupun Muslimat dan Fatayat NU. Sedangkan sumber sekunder peneliti menemukan buku ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji. Langkah selanjutnya verifikasi (kritik sumber) pertama peneliti melakukan kritik ekstern untuk mengetahui keotentikan sumber dan data dengan memilah atau menyeleksi data agar mendapat data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian kedua peneliti melakukan kritik intern yaitu kritik terhadap isi sumber dengan cara membandingkan satu sumber dengan sumber lainnya. Selanjutnya Interpretasi, peneliti menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah didapat kemudian dihubungkan dan dikaitkan satu sama lain. Langkah terakhir Historiografi, peneliti melakukan penyusunan fakta-fakta sejarah yang telah melalui tahap pencarian, penilaian dan penafsiran sumber, fakta tersebut disusun sesuai kronologis sehingga menjadi rangkaian cerita sejarah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama, penggunaan pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan peran agama dalam masyarakat (Pramono, 2017:2). Melalui pendekatan ini peneliti akan melihat peran NU dalam menangani permasalahan anggota perempuan NU, sesuai dengan landasan yang di pegang. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori peranan, menurut soerjono soekanto (2002:243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Teori ini digunakan untuk menganalisis peranan NU dalam pemberdayaan perempuan. Adapun Penjelasan analisis indicator teori peranan dapat diketahui bahwa individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah organisasi Nahdlatul Ulama', membuat suatu aturan berupa kebijakan tentang pemberdayaan perempuan, sebagai langkah awal dalam melakukan peranan. Kemudian kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan dengan berupa tindakan-tindakan agar dapat diketahui hasil peranan yang dilaksanakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Nahdlatul Ulama' (NU) menanggapi suatu permasalahan yang dihadapi anggotanya ataupun yang sedang dihadapi bangsanya, dengan langkah pertama mengeluarkan kebijakan-kebijakan (Haidar, 2011: 18). Kebijakan tersebut berguna sebagai pedoman dan dasar warga NU dalam mengambil tindakan. Pimpinan besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) mengeluarkan kebijakan perlindungan perempuan pada Mukhtamar NU ke 28 tahun 1989 di Yogyakarta yang *pertama* berbunyi Perempuan harus memiliki kualitas yang baik dari segi pengetahuan dan keterampilan (PBNU, 1989:161), kemudian kebijakan *kedua* yaitu perempuan dan laki-laki mengedepankan 4 prinsip dalam bermasyarakat, prinsip tersebut adalah menjunjung tinggi persamaan, keadilan, kebebasan, dan menghindari penggunaan kekerasan (Ma'mur, 2015: 225). Kebijakan-kebijakan NU dalam perlindungan perempuan tahun 1989 merupakan langkah awal untuk para anggotanya lebih melindungi perempuan dari adanya diskriminasi dengan meningkatkan kualitas perempuan.

Muslimat dan Fatayat NU mendiskusikan wacana-wacana diskriminasi gender secara kritis pada tahun 1990 (Asmani, 2015:35). Diskriminasi gender merupakan perlakuan berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan gender, perlakuan berbeda seperti peminggiran, penomorduuan, kekerasan, dan beban kerja berlebihan (Fakih M, 2013: 18). Muslimat dan Fatayat NU bergabung bersama KOMNASHAM, DPR dan LSM lainnya untuk memperjuangkan agar perempuan tidak lagi mengalami kekerasan (Fatimah, 2007: 100). Maka dari itu, NU membuat kebijakan untuk menjadikan perempuan tangguh sehingga tidak mengalami kembali kekerasan ataupun diskriminasi gender.

Kebijakan selanjutnya dikeluarkan oleh PP Fatayat NU dalam Kongres Fatayat ke 10 tahun 1989 di Yogyakarta yang berbunyi Perempuan harus berpakaian sopan sesuai dengan syariat Islam dan perempuan harus memiliki akhlaqul karimah (PP Fatayat NU, 1989:50). Kebijakan tersebut bertujuan membentuk perempuan memiliki akhlak baik dan sopan dalam berbusana, guna melindungi pandangan nafsu laki-laki (Gunarsa, 2011: 28). Kebijakan tersebut selain dapat melindungi perempuan, juga dapat menjaga pandangan laki-laki berbuat dosa.

Kebijakan NU pada bidang pendidikan perempuan, NU memperjuangkan pendidikan perempuan mulai tahun 1920 (Athoilalah A, dkk , 2015: 97). Pada awalnya pendidikan di NU hanya terfokus pada pendidikan agama yang dilakukan di pondok pesantren (Hasbuallah H, Hafidhuddin D, Hussini A, Mujahidin E. 2016: 394). Kemudian tahun-tahun berikutnya, NU mengembangkan pendidikan untuk perempuan kependidikan formal dan non formal sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional Indonesia. pada tahun 1989 PBNU mengeluarkan kebijakan yaitu transformasi pendidikan pesantren dengan memasukan mata pelajaran umum di pondok pesantren, setiap madrasah dan sekolah NU harus mewujudkan system pendidikan yang demokratis dan berkualitas, dan kewajiban belajar 9 tahun serta pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia (PBNU, 1989:153). Kebijakan NU membawa pendidikan perempuan mulai meningkat tahun 1990, dengan banyaknya perempuan masuk pada jenjang pendidikan diatas SLTA, Bahkan di beberapa perguruan tinggi jumlah mahasiswa perempuan relative

berimbang dengan jumlah mahasiswa laki-laki (Hubeis, 2016:218). Pendidikan merupakan hal yang sangat penting apalagi untuk perempuan adalah pendidikan pertama untuk anak-anaknya dan juga dengan perempuan mendapat pendidikan layak akan memberi peluang untuk perempuan semakin berkarir dan berkarya.

Organisasi NU mengeluarkan kebijakan untuk memenuhi hak-hak perempuan diantaranya hak kesehatan, hak ekonomi, hak politik dan hak publik. Dalam pemenuhan hak kesehatan kebijakannya adalah Perempuan mendapatkan sarana, prasarana dan tenaga medis, dan perempuan harus memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi (PP Fatayat NU, 1989:66). Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pimpinan pusat Fatayat NU pada Kongres Fatayat ke 10 tahun 1989 di Yogyakarta. Dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut, NU dan pemerintah bekerja sama memberikan penyuluhan agar tidak terjadi pernikahan dini yang akan menimbulkan kehamilan dini yang sangat beresiko dan diharapkan agar kesehatan perempuan dapat terjamin dan angka kematian ibu dan bayi menurun.

Kebijakan dalam pemenuhan hak ekonomi adalah perempuan melakukan pemberdayaan ekonomi dimulai dengan keluarga produktif, dan perempuan harus meningkatkan pengalaman dan keterampilan teknik ekonomi (PBNU, 1989:157. Wahyuni, 2014: 4). Kemudian kebijakan dalam pemenuhan hak politik dan hak publik adalah Muslimat dan fatayat menjadi wadah untuk para perempuan berproses menjadi percaya diri sehingga berani dalam berbicara dalam publik (PBNU, 1989: 160. PP Fatayat NU, 1989: 55), sedangkan untuk hak politik NU mengeluarkan kebijakan yaitu para perempuan dibebaskan untuk menggunakan hak politiknya asalkan tetap bertanggung jawab dan berpegang teguh pada Ahlussunah Waljama'ah (Haidar, 2011:27). Dengan demikian, NU membahas bahwa perempuan mempunyai kesempatan kerja, sama dengan laki-laki, dengan persyaratan perempuan tidak akan lupa tugasnya terhadap keluarga (pekerjaan domestic).

Kebijakan-kebijakan diatas menjadi pedoman NU dalam usaha pemberdayaan perempuan, NU memberi kebebasan kepada para banom-banomnya dalam membuat program kerja, asalkan tetap mengacu pada kebijakan

dan arahan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama' (PBNU, 1989: 28). Usaha NU dalam perlindungan perempuan diantaranya forum diskusi yang membahas tentang isu-isu gender dilaksanakan pada tahun 1990-1994 kemudian diadakan evaluasi tahun 1995 yang kemudian di lanjut pada tahun 1996 dengan terdapat perubahan yang pada awalnya hanya dilakukan oleh para pengurus fatayat pusat saja tapi pada tahun 1996 mendatangkan perwakilan dari masing-masing wilayah (Ma'mur, 2015:88). Kegiatan forum diskusi ini merupakan sebuah langkah Muslimat dan Fatayat NU untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perempuan seperti kekerasan dan diskriminasi gender, sehingga menemukan solusi yang baik untuk permasalahan tersebut.

Nahdlatul Ulama' (NU) memberikan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan berbicara dan bela diri dengan memiliki tujuan agar perempuan dapat melindungi dirinya sendiri (Parawansa, 2017: 98). Usaha ini dilaksanakan oleh Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama' (IPPNU) dibawah pengawasan Muslimat dan Fatayat NU, kegiatan ini dimulai pada tahun 1990 bertempat di mushola-mushola NU yang berada diberbagai ranting (Parawansa, 2006: 79). Perempuan dalam pelatihan ini diharapkan dapat berani berbicara ketika mendapat suatu masalah dan perempuan juga dapat melindungi dirinya sendiri apabila mengalami sebuah kekerasan atau penganiayaan.

Usaha selanjutnya yaitu terwujudnya desa binaan sebagai sarana penyuluhan kesehatan masyarakat dan upaya meningkatkan pendapatan keluarga (PP Fatayat NU, 1989: 68). NU melakukan pendekatan terhadap warga desa melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian, tahlilan, dan manaqiban, kemudian dari kegiatan tersebut NU mesisipkan penyuluhan kesehatan ataupun pengajaran keterampilan, hal itu merupakan proses perwujudan usaha NU pada tahun 1990-1992 (PBNU, 1992: 93). NU juga melakukan pembinaan perilaku sosial keagamaan bagi generasi perempuan muda mulai tahun 1989, guna melindungi perempuan agar tidak keluar dari kodratnya (PBNU, 1992: 88). Pembinaan tersebut seperti tata busana perempuan harus sesuai dengan syariat Islam yaitu berpakaian yang menutup aurat, Pembinaan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan rutin keagamaan yaitu pengajian yang dilaksanakan pada masing-masing ranting



yang tersebar di 27 wilayah di Indonesia (Farih, 2016: 108). Dalam memenuhi pengetahuan perempuan tentang kodrat wanita Islam NU mengadakan seminar-seminar yaitu seminar keadilan gender dan seminar khittah NU yang dilaksanakan bertempat di kantor pusat Fatayat NU pada tahun 1994 (Ma'mur, 2015:78). Usaha terwujudnya desa binaan dan pembinaan perempuan diharapkan menghasilkan perempuan yang unggul serta memiliki akhlaqul karimah, dan Seminar yang diadakan organisasi NU dapat menjadikan perempuan memiliki pengetahuan dalam melindungi diri sendiri dari ketidakadilan gender, seperti tidak diam saja ketika mendapat kekerasan, pelecehan dan pembatasan hak.

Usaha pada pendidikan perempuan diantaranya transformasi pendidikan pesantren yaitu perempuan mendapat pendidikan agama dan pendidikan umum seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan Ilmu alam di pondok pesantren, Kemudian fasilitas pendidikan perempuan dan laki-laki mendapatkan sama (PBNU, 1992:88. Fauzan, 2017:604), pondok pesantren NU perpaduan antara syalaf dan kholaf antara lain PP Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, PP Tebuireng Jombang, dan PP Mamba'ul Ma'arif Deanyar Jombang (Maksum, 2015:88). Selain itu NU juga membangun madrasah-madrasah di berbagai wilayah di Indonesia, sebagai upaya pemerataan pembangunan dan meningkatkan pendidikan formal para kadernya di tahun 1989-1997 (PBNU, 1989:84), kemudian NU juga menciptakan perguruan tinggi memili taraf internasional dibangun dikawasan Wonorejo, Sukolilo dan Surabaya (Parawansa, 2017:198). NU juga melakukan usaha di pendidikan nonformal diantaranya mengaktifkan kursus-kursus keterampilan seperti menjahit, menyulan, dan memasak. Kemudian mengadakan kursus untuk pemberantasan 4 buta yakni buta huruf/aksara, buta bahasa Indonesia, buta pengetahuan dasar, dan buta Al-Qur'an/PAI, kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tahun 1990 (PBNU, 1992:93). Dengan demikian, usaha NU pada pendidikan perempuan bukan hanya pendidikan agama yang diperhatikan tetapi pendidikan formal dan nonformal juga menjadi perhatian organisasi NU.

Nahdlatul Ulama' (NU) mendirikan 16 rumah sakit yang mulai dirintis sejak tahun 1979 dan baru terealisasikan di tahun 1990 (PBNU, 1992:99),

pembangunan tersebut merupakan usaha untuk menekan kematian Ibu dan anak saat proses kehamilan ataupun melahirkan. Selain itu, NU juga mendirikan 8 BKIA, dan mengadakan pembinaan balita sehat yang dipantau setiap satu bulan sekali (PP Fatayat NU, 1994:24). Usaha-usaha ini disambut atusias oleh para masyarakat, karna adanya rumah sakit atau rumah bersalin di daerah, mereka lebih mudah apabila ingin melakukan konsultasi kesehatan atau berobat (PP Fatayat NU, 1994:59). Dengan demikian, NU melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan lebih ditekankan kepada perempuan dan anak-anak, karena mereka merupakan bagian penting dalam menghasilkan generasi selanjutnya yang potensial mengembangkan agama, bangsa, dan negara.

Pada bidang ekonomi, NU mengusahakan peningkatan perekonomian tradisional dan terus mengembangkan perekonomian modern baik dipedesaan dan perkotaan tahun 1989-1997 (PBNU, 1989:157), dengan cara warga lebih produktif sendiri dengan mendirikan usaha-usaha rumah tangga seperti membuat roti kering, membuat kerajinan tas dari bamboo, menyulam benang menjadi tas-tas yang menarik, semua itu dapat diperdagangkan sehingga dapat menambah pundi-pundi rupiah (Hidayah, 2014: 86). NU juga mengadakan pendekatan dengan kelompok-kelompok lain yang bergerak di bidang ekonomi, baik dalam maupun luar negeri sehingga dapat meningkatkan solidaritas sosial (Parawansa, 2006:74). NU menyadari bahwa cita-cita bangsa Indonesia hanya dapat terwujud apabila mengoptimalkan potensi nasional seperti SDA dan SDM tanpa harus membedakan rasa tau jenis kelamin.

Nahdlatul Ulama' (NU) mengusahakan hak politik perempuan dengan cara mengirimkan kadernya untuk duduk di jajaran pemerintahan daerah maupun pusat dan membebaskan perempuan untuk mengikuti partai manapun asal tetap memegang ahlussunah waljama'ah (Parawansa K, 2017: 22). NU menyadari bahwa khittah NU 1926 memberi kebebasan bagi warga untuk menyalurkan aspirasi politik mereka, Hal tersebut akan menyebabkan timbulnya keragaman politik di umatnya, oleh sebab itu Muktamar NU memutuskan perbedaan pandangan aspiran-aspiran politik warga NU tetap berjalan dalam rasa persaudaraan, tawadu' dan saling menghargai, sehingga dalam berpolitik

tetap terjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan NU (Haidar A, 2011: 261). Jadi, NU memutuskan tidak mengikat dengan organisasi sosial politik manapun sesuai khittah 1926, tetapi NU membebaskan anggotanya untuk menggunakan hak-hak politik mereka dengan tetap mengedepankan tawadlu', ta'awun dan tasamuh serta NU khususnya Fatayat dan Muslimat NU dapat menjadi wadah untuk para perempuan berproses. Semua itu Demi kemashlahatan bersama dan kemajuan Negara Republik Indonesia.

Selain itu, NU mengadakan *Training Gender* yaitu upaya penyadaran baik untuk perempuan dan laki-laki tentang peran gender sesungguhnya. *Training Gender* merupakan bagian dari program politik sejak awal dekade 1990-an (Fatimah S, 2007: 99-100). Aktivis perempuan melakukan konsolidasi dalam jaringan kerja gender dalam skala daerah maupun nasional (Wahyudi, 2018:69). Adanya deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 1993, membuat aktivis perempuan mempunyai kesadaran untuk mengungkapkan dan melawan dalam masalah-masalah gender khususnya kekerasan terhadap perempuan (Mustam, 2017:186). Dengan demikian, para aktivis perempuan melakukan perlawanan secara terang-terangan setelah adanya deklarasi yang melindungi perempuan dalam tindak kekerasan.

Nahdlatul Ulama' (NU) melakukan pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik diranah publik maupun domestik. Suatu upaya perlu dilakukan berbagai pihak termasuk didalamnya adalah dari organisasi perempuan Islam, seperti Muslimat NU dan Fatayat NU. Organisasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan dan peningkatan kualitas hidup perempuan seperti dibidang sosial, pendidikan, politik dan kesehatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Organisasi NU merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia dan memiliki banyak anggota yang selalu patuh dan manut setiap peraturan organisasi. Pada tahun 1989-1997 NU sedang gencar-gencarnya melakukan pemberdayaan perempuan yang menekankan pada peningkatan

kualitas perempuan. Langkah awal Nahdlatul Ulama' (NU) yaitu mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan pada tahun 1989, diantaranya perempuan harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang baik, perempuan memiliki akhlaqul karimah, perempuan berhak mendapat pendidikan sama dengan laki-laki sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional Indonesia, perempuan memperoleh sarana dan prasarana yang layak untuk kesehatan dan kebijakan terakhir Muslimat dan Fatayat sebagai wadah untuk para perempuan berproses untuk mendapat hak politik dan publik.

Semua kebijakan tersebut diwujudkan dalam beberapa usaha-usaha yang di lakukan NU diantaranya mengadakan forum diskusi, pelatihan percaya diri dan bela diri untuk perempuan, pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia, pemerataan pembangunan sarana prasana kesehatan, mengadakan penyuluhan KB, memberikan keleluasaan perempuan dalam berpolitik dengan tetap memegang Ahlussunah wal jama'ah dan pedoman politik NU dan terakhir *training gender*. Usaha yang telah dilakukan membuahkan beberapa hasil yaitu banyaknya perempuan yang sudah terpenuhi hak-haknya, dengan demikian NU sebagai organisasi sosial keagamaan sukses melaksanakan perannya dalam masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang sejarah pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh organisasi NU. para pembaca dapat mengambil hikmah serta turut serta dalam pemberdayaan perempuan sehingga tidak terjadi diskriminasi gender. Bagi organisasi NU diharapkan dapat selalu mengembaangkan pemberdayaan perempuan, dan untuk para perempuan diharapkan dapat turut serta kerjasama dan mematuhi segala kebijakan yang telah dibuat, agar terwujud tujuan organisasi NU yaitu mensejahterakan anggotanya baik laki-laki maupun perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

Asmani, JM. 2015. KEPEMIMPINAN PEREMPUAN: Pergulatan Wacana di Nahdhatul Ulama (NU). *ADDIN*.vol 9 (1): 33

- Athoillah, A, dkk. 2015. *KIAI BISRI SYANSURI :Tegas Berfiqih, Lentur Bersikap*. Surabaya: Pustaka Adea
- Ekawati, E. 2016. Nahdhatul Ulama (NU) Sebagai Civil Society di Indonesia.- *Nuansa*. Vol 13 (2): 234.
- Fakih M. 2013. *Analisis Gender&Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farih, A. 2016. Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan NKRI. *Walisongo: Jurna Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol 24 (2).
- Fathoni, A. 2018. Nyai Aisyah Hamid Baidlowi, Memajukan Kiprah Perempuan Indonesia. [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id). 28
- Fatimah, S. 2007. Perempuan dan Kekerasan pada masa Orde Baru. *Demokrasi*. Vol VI (2): 99-100
- Fauzan. 2017. Urgensi Kurikulum Integrasi di Pondok Pesantren dalam Membentuk Manusia Berkualitas. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*. Vol 6 (2401)
- Gunarsa, AKR. 2011. Islam Menjaga dan memuliakan wanita. [www.Muslim.or.id](http://www.Muslim.or.id). 28
- Haidar, A. 2011. *Nahdlatul Ulama' dan Islam di Indonesia*. Sidoarjo: Al-Makatabah
- Hasbuallah H, Hafidhuddin D, Hussini A, Mujahidin E. 2016. Kebijakan Pendidikan Nasional terhadap Pendidikan Islam dan Pendidikan Sekuler. *Miqot*. Vol XI (2): 394-399
- Hidayah, N. 2014. Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan dalam Islam. *Ahkam*. Vol 14 (1): 86
- Hubeis, A. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Ismiati, TA. 2017. Peranan Muslimat sebagai Organisasi Wanita Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri: 1950-1999. *Simki-Pedagogia*. Vol 1 (9): 1
- Isnaeniyah, E. 2017. Partisipasi Politik Perempuan Islam Indonesia dalam Tradisi NU. *Jurnal agama dan lintas budaya*. vol 2 (1):155
- Kuntowijoyo. 2012. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Mahdi, A. 2013. Sejarah dan Peran Pesantren dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Islamic review*. Vol II (1)

- Maksum, A. 2015. Model Pendidikan Toleransi di Pesantren Modern dan Salaf. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol 03 (1)
- Ma'mur, J. 2014. Dinamika Pemikiran Gender dalam NU (Studi Keputusan Muktamar NU ke 28 1989 sampai Muktamar NU ke 32 2010). *Disertasi*. Semarang. IAIN Walisongo.
- Ma'mur, J. 2015. *Rezim Gender di NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulia, M. 2013. Hukum Islam dan Dinamika Feminisme dalam Organisasi Nahdlatul Ulama'. *Al-Ahkam*. Vol 23 (1): 52
- Mustam, A. 2017. Budaya Gender dalam masyarakat Perspektif temporal ekologi dan sosial ekonomi. *Jurnal Maiyyah*. Vol 10 (1): 186
- Parawansa, KI. 2006. *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi, Pemikiran Tentang Kesetaraan Gender*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Parawansa, KI. 2017. *NU, Perempuan, Indonesia Sudut Pandang Islam Tradisional*. Bandung: NUANSA CENDEKIA
- PBNU. 1989. Hasil-Hasil Muktamar NU ke 28. Yogyakarta.
- PBNU. 1992. Laporan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama'. Bandar Lampung
- PBNU. 1991. Laporan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama' Tanfidziyah
- PP Fatayat NU. 1989. Keputusan-Keputusan Kongres X Fatayat Nahdhatul Ulama'. Yogyakarta.
- PP Fatayat NU. 1994. Bina Balita. Jakarta
- Roviana, S. 2014. Gerakan Perempuan Nahdhatul Ulama' dalam Transformasi Pendidikan Politik. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol 3.
- Soekanto, S. 2002. *Sosiologi sebagai Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara
- Wahyudi, V. 2018. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Jurnal Politik Islam*. Vol 1 (1): 69
- Wahyuni, S. 2014. *Perempuan di Mata NU (Bahtsul Masail NU tentang Perempuan dari masa ke masa)*. Yogyakarta: Gapura Publishing
- Zayd, NHA. 2003. *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: SAMHA